

BAB VI

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

6.1. Arah Pembangunan

Tujuan jangka panjang pembangunan daerah 2005-2025 adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang berbudaya, maju dan sejahtera. Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan tujuan jangka panjang nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai ukuran bagi pencapaian Kepulauan yang berbudaya, maju dan sejahtera dalam 20 tahun yang akan datang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

6.1.1. Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya karakter dan kepribadian masyarakat yang bermoral, beretika, berorientasi kinerja, kemajuan iptek serta berdisiplin sebagai perwujudan pengamalan nilai agama, norma hukum dan budaya yang luhur.
2. Terbangunnya sistem pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai agama, norma hukum dan budaya serta mengembangkan kemampuan lembaga pendidikan dan lembaga adat melalui pengenalan dan penanaman nilai-nilai agama, norma hukum dan budaya Melayu dan budaya disiplin baik pendidikan sekolah, luar sekolah dan keluarga mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
3. Meningkatnya peran lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga adat bersama dengan pemerintah untuk memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai agama, norma hukum dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akhlak dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Berkembang dan lestari budaya daerah terutama dengan memberdayakan nilai-nilai budaya Melayu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut melalui peningkatan pemakaian simbol dan atribut budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintahan secara terus menerus termasuk pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui peningkatan event kesenian dan budaya yang mendukung kegiatan pariwisata



dan sebaliknya pariwisata yang mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu;

5. Terlaksananya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan Melayu serta terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai Budaya Melayu, baik melalui pendidikan sekolah, luar sekolah dan dalam keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran dan menjunjung hukum, moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Kesadaran ini akan membentuk karakter dan budaya disiplin dalam segala aspek kehidupan seperti taat pajak, taat dalam pemanfaatan rencana penataan ruang, tertib berlalu lintas dan berdisiplin sebagai sebuah ciri bagi masyarakat yang maju dan modern.
7. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengurangi penyakit sosial masyarakat baik prostitusi, perdagangan orang maupun penyalahgunaan obat terlarang dan berbahaya serta kegiatan negatif lainnya yang bertentangan dengan agama, hukum dan moral.
8. Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila sehingga kerawanan sosial dan politik dapat dihindari dan disintegrasikan bangsa tidak terjadi, serta terbinanya kultur politik demokratis yang santun dan menghargai perbedaan pandangan dalam membangun bangsa.

6.1.2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup sumberdaya manusia termasuk perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sehingga mampu memberikan peranan dan kontribusi dalam pembangunan daerah dan tidak menjadi beban pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang didukung oleh penataan sistem dan manajemen pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari jumlah dan persentase lulusan, persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan tinggi dan persentase lulusan yang mampu masuk ke pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja.
3. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha khusus bagi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi dengan masyarakat



yang berkualitas pendidikan dan didukung fasilitas pendidikan dan tenaga pendukung pendidikan yang baik, maju dan berkualitas.

4. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, perekonomian daerah dan pembangunan nasional.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan melalui program peningkatan mutu dan manajemen pengelolaan pendidikan serta meningkatnya rata-rata waktu masyarakat mengikuti pendidikan sekaligus meningkatnya relevansi pendidikan terhadap pasar kerja.
6. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap hukum dan perundang-undangan sehingga membentuk budaya disiplin sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju.
7. Dilaksanakannya penerapan *reward and punishment* di lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin terhadap perundang-undangan seperti tertib lalu lintas, ketaatan dalam pemanfaatan ruang/lahan, budaya bersih, budaya antri dan taat pajak serta peraturan perundang-undangan.
8. Berkembangnya sikap profesional bagi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan etos kerja. Penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya dan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja. Terwujudnya sistem dan berkembangnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Terwujudnya penerapan standardisasi terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
9. Terwujudnya *Merit System* dalam peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan karir berbasis kinerja dan sistem *recruitment by expertise*. Terwujudnya tenaga kerja yang bermutu dan berdaya saing melalui peningkatan mutu tenaga kerja lokal melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan profesional lainnya baik di dalam maupun luar negeri dan peningkatan wawasan kewirausahaan pada pelaku usaha kecil dan menengah.



10. Tersusunnya rencana dan program pendidikan yang berfokus, mantap, terpadu dan berkelanjutan; Meningkatnya APK dan APS untuk tingkat TK/PAUD, untuk tingkat SMP/MTS, dan untuk tingkat SMA/SMK.
11. Tertatanya kelembagaan, perangkat dan kewenangan antara pihak keamanan dengan pihak terkait sehingga keamanan masyarakat dapat terjamin, dan terwujudnya rasa aman dilingkungan masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat
12. Tersedianya pendidikan unggulan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sesuai dengan kondisi daerah khususnya kepulauan yang berbasis kemaritiman dan tersedianya pendidikan dasar dan menengah yang murah tapi berkualitas dan mudah diakses serta pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawan sosial.

6.1.3. Meningkatnya Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khusus Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata ditandai dengan hal-hal berikut:

1. Terbangunnya sistem perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh daerah. Terwujudnya sektor pertanian dalam arti luas khususnya sub sektor perikanan, kelautan, pertambangan dan pariwisata serta industri sebagai sektor unggulan daerah dan menjadi basis aktivitas ekonomi. Terwujudnya pengelolaan yang efisien dan profesional dari potensi sektor unggulan sehingga menghasilkan produk unggulan daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan.
2. Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bagian Barat Indonesia, dengan keunggulan bidang industri, perikanan, kelautan dan pariwisata. Tumbuh dan berkembangnya pusat ekonomi baru di wilayah Kepulauan Riau dengan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi dan mampu mendorong sektor lain dalam memberikan pelayanan lebih baik dan berdaya saing.
3. Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.
4. Terkelolanya potensi wilayah terutama aspek kemaritiman sebagai modal dasar pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional. Termanfaatkannya sumber daya alam baik kelautan, perikanan, pariwisata



dan pertambangan maupun sumber daya lainnya bagi pendorong ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah dan nasional. Tersedianya infrastruktur dasar utama bagi pengembangan maritim baik industri pengolahan, kelautan, perikanan, pertambangan maupun pariwisata. Meningkatnya peran sektor unggulan dalam perekonomian daerah dan menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

5. Terwujudnya kerjasama antar daerah, regional dan internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka membentuk sinergitas ekonomi dan jaringan pertumbuhan ekonomi yang handal dan terintegrasi.
6. Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan rumah tangga, bisnis, sosial dan kebutuhan publik lainnya termasuk industri. Terselenggaranya pelayanan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan daerah cepat tumbuh serta pengadaan dan pengembangan sarana sumber air bersih bagi kebutuhan masyarakat pedesaan.
7. Tersedianya produk hukum di bidang investasi dan penanaman modal serta perlindungan usaha ekonomi kerakyatan dengan koordinasi bersama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Meningkatnya investasi domestik dan investasi asing serta tersedianya peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha serta didukung dengan penegakan hukum yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan daerah.
8. Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia dalam semua bidang terutama disektor unggulan agar mampu mengikuti perkembangan dan sejajar dengan negara tetangga dengan dukungan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kepribadian yang sesuai dengan karakter dan budaya.
9. Meningkatnya efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilandasi oleh sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, responsif dan berorientasi kinerja.
10. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja lokal dan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya sistem informasi pasar kerja. Seluruh perusahaan yang melakukan investasi di wilayah Kepulauan Riau menerapkan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO).



11. Tersedianya sarana dan prasarana lembaga diklat ketenagakerjaan (BLK) yang memadai baik melalui kerjasama pelatihan, pengembangan lembaga pelatihan dan lainnya. Tersedianya pegawai teknis ketenagakerjaan seperti mediator, instruktur, pengawas tenaga kerja, dan lainnya.

6.1.4. Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak ditandai dengan hal-hal berikut:

1. Berkembangnya pembangunan dan pemerataan hasilnya keseluruh wilayah yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam pembangunan yang berbasis keadilan dan proporsionalitas dalam kerangka persatuan daerah dan ketahanan nasional.
2. Tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medis lainnya. Terlayannya seluruh lapisan dan kelompok masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dan pulau terpencil dan tersedianya pusat pelayanan kesehatan skala provinsi yang mampu menjadi rujukan bagi daerah lainnya.
3. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, pengolahan sampah perkotaan, angkutan, perumahan dan sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk usia kerja dan kesempatan untuk membuka lapangan kerja baru guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi dan berkurangnya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pencari kerja serta menerapkan kebijakan *affirmative* pada unit-unit yang melakukan usaha skala besar di daerah terhadap pekerja lokal.
5. Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi upaya menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk. Berkurangnya kerusakan lingkungan akibat menurunnya kualitas lingkungan dengan melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
6. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat dengan jumlah dan harga terjangkau melalui upaya pengendalian harga dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun, dan pengembangan



potensi daerah seperti perikanan dan pertanian sehingga menjadi kegiatan ekonomi produktif.

7. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan yang modern dan dengan dukungan sarana dan prasarana dan sistem yang berkualitas, maju dan modern.
8. Terkelolanya kawasan potensial pertanian dan perikanan bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjamin ketahanan pangan serta mendorong kegiatan ekspor dari hasil olahan perikanan, kelautan dan pertanian.
9. Terkendalinya perkembangan dan distribusi penduduk serta distribusi penduduk pada kawasan potensial untuk pengembangan pemukiman dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan.
10. Meningkatnya kualitas pelayanan medis baik di rumah sakit maupun di puskesmas dengan dukungan ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang profesional, memadai dan berkualitas dengan sarana dan prasarana yang maju dan modern. Tersedianya akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan harga terjangkau termasuk harga obat dan perbekalan kesehatan.
11. Meningkatnya angka harapan hidup dan status gizi dan didukung dengan upaya pencegahan dan penggulungan berbagai penyakit menular secara berkesinambungan seperti malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan penyakit menular berbahaya lainnya.
12. Meningkatnya kesadaran untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, terwujudnya sistem informasi kesehatan yang optimal, cepat, akurat dan valid sehingga dapat mempercepat penentuan kebijakan dan intervensi yang perlu dilakukan.

6.1.5. Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata ditandai dengan hal-hal berikut:

1. Ditetapkannya wilayah Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan perkembangan ekonomi nasional dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam menetapkan kawasan strategis nasional baik dari aspek ekonomi maupun aspek ketahanan nasional.
2. Tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru diseluruh wilayah yang merata terutama industri dan pariwisata yang berbasis kelautan serta sesuai dengan potensi dan keunggulannya. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan terbangunnya industri-



industri yang berbasis kelautan. Meningkatnya orientasi pengembangan maritim bagi masyarakat yang selama ini berorientasi darat menjadi berorientasi laut. Terwujudnya kawasan ekonomi terpadu sebagai bagian dari kawasan strategis nasional khususnya Bagian Barat Indonesia.

3. Tersedianya sarana prasarana pariwisata dengan didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian serta infrastruktur perekonomian lainnya yang berkualitas sekaligus mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata dan meningkatkan aksesibilitas dari dan ke objek dan daya tarik wisata dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah.
4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan sarana perhubungan antar pulau dan antar daerah yang memadai. Terciptanya sinkronisasi pembangunan infrastruktur darat dengan pengembangan potensi maritim dan pemberdayaan potensi kelautan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
5. Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi dan kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau dengan dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dan kesadaran akan hukum dan kelestarian lingkungan.
6. Terwujudnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan terjaminnya keamanan dan kenyamanan pelaku usaha dalam berinvestasi baik aman dari gangguan, bencana alam, kerusakan dan kerusuhan sosial.
7. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan guna menjamin dan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan didukung adanya peningkatan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan memperhatikan prinsip kelestarian dan berkelanjutan.
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah dan mengurangi ekonomi berbiaya tinggi dan terwujudnya pemanfaatan dan hasil guna sumber daya alam yang optimal baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
9. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan bagi seluruh pelaku pembangunan termasuk mengurangi jumlah lahan kritis yang dilakukan secara



terus menerus dan dengan arahan pembangunan yang terintegrasi serta diikuti dengan penegakan hukum.

10. Terwujudnya sinergi antara sektor publik dan privat untuk mengakselerasi perekonomian di seluruh wilayah Kepri melalui upaya menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan privat).
11. Terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah melalui upaya meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan serta sarana dan prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh wilayah dengan menjadikannya sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
12. Tumbuhnya ekonomi daerah berdasarkan pengembangan potensi daerah melalui upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, memperhatikan potensi dan keunggulan daerah serta didukung oleh peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan;
13. Meningkatnya kelancaran arus barang dan orang dari dan ke seluruh wilayah dan antar daerah agar terciptanya pemerataan pembangunan dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah melalui upaya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara.

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia

Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau merupakan kondisi riil yang menjadi sebuah nilai bagi masyarakatnya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian tersebut. Untuk mendukung perwujudan tersebut dilakukan dengan langkah kebijakan yang cepat dan selaras antara satu dengan lainnya.

1. Pembangunan mental dan spiritual dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga adat dalam memperkenalkan dan mengembangkan pengamalan dan penerapan nilai-nilai agama, hukum dan budaya Melayu dalam upaya meningkatkan ahlak dan kepribadian masyarakat.



2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam memperkenalkan nilai agama, nilai budaya dan norma hukum baik dengan menerapkan kurikulum muatan lokal atau muatan mata pelajaran yang meningkatkan akan karakter dan kepribadian dengan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan beretika.
3. Pembangunan bidang hukum dan pemerintahan diarahkan untuk menumbuhkembangkan jiwa keteladanan masyarakat dalam hal pengamalan nilai agama, norma hukum dan nilai budaya melalui upaya memberikan contoh dalam kepemimpinan dan tokoh masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai agama, norma hukum dan nilai budaya.
4. Pengembangan kepribadian daerah diarahkan untuk menumbuhkembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa di masyarakat yang dititikberatkan melalui kepemimpinan dan pengembangan jiwa keteladanan dalam organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan termasuk aparatur pemerintah melalui kegiatan yang dilakukan yang ditekankan atas prakarsa sendiri.
5. Meningkatkan peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembinaan dan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat serta membina hubungan yang harmonis antara pemeluk agama, antar suku bangsa dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di Kepulauan Riau.
6. Memperkuat wawasan kebangsaan dan mempercepat penerapan proses demokrasi yang menjunjung tinggi nilai etika dan budaya dan bertujuan sekaligus untuk memperkuat ketahanan di bidang sosial, politik dan ekonomi di samping menciptakan rasa aman di masyarakat. Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana serta memberdayakan LSM dan Ormas termasuk partai politik.
7. Pembangunan politik diperlukan dan diarahkan untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan, mengantisipasi agar tidak terjadi konflik antar masyarakat yang bernuansa SARA sehingga tidak mengganggu ketahanan nasional dan persatuan nasional.
8. Revitalisasi budaya dan pengembangan kesenian daerah yang diarahkan untuk menjunjung nilai budaya dan kepatuhan terhadap etika dan hukum. Pendidikan kesenian, budaya, hukum dan budi perkerti pada semua tingkatan pendidikan.



6.2.2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya saing daerah baik skala nasional dan global. Pendidikan akan mempengaruhi etos kerja dan akhirnya meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi perlu ditentukan arah kebijakan pembangunan.

1. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas didukung dengan peningkatan kualitas lulusan baik melalui serangkaian kebijakan perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, melalui penguatan tatakelola, sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan intern. Pendidikan yang berkualitas didukung dengan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga kependidikan dan mutu tenaga pendidikan, manajemen pendidikan serta peningkatan relevansi pendidikan terhadap pasar kerja.
2. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan bagi upaya mengembangkan pendidikan dan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan potensi lokal seperti perikanan, kelautan, pertambangan dan pengembangan perhubungan antar pulau dan industri maritim. Meningkatkan kualitas guru dan lembaga pendidikan agar memenuhi standar yang diharapkan. Meningkatkan peran masyarakat dalam pendirian dan pengembangan serta pembinaan pendidikan dan lembaga pendidikan.
3. Pembangunan dan pengembangan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia mutlak didukung dengan keberadaan perpustakaan. Untuk itu diarahkan pengembangan minat baca masyarakat melalui pembangunan perpustakaan dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap arsip dan mengintegrasikan pengumpulan arsip dalam satu lembaga yang kredibel sehingga dapat berperan dalam membentuk dokumentasi sejarah yang penting bagi generasi muda.
4. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan melaksanakan strategi menggabungkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas baik guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya termasuk membantu penduduk yang tidak mampu agar



dapat tetap bersekolah. Selain itu persiapan kurikulum yang dapat diaplikasikan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pembangunan Provinsi

5. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dan menyediakan infrastruktur pendidikan yang modern dan maju serta merata diseluruh wilayah termasuk daerah dan pulau terpencil dengan tetap memperhatikan masyarakat yang tergolong masyarakat rentan dan komunitas terpencil.
6. Pembangunan ketahanan ekonomi diarahkan guna meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak berkepentingan terhadap pentingnya merubah orientasi kehidupan dari berbasis darat kepada basis kelautan. Mengelola dan mengatur, memelihara, melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan.
7. Pembangunan bidang aparatur diarahkan dengan kebijakan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya dengan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja dan menyiapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Pengembangan karir berbasis kinerja serta peningkatan mutu tenaga kerja lokal melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan profesional lainnya.
8. Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk meningkatkan wawasan kewirausahaan pada pelaku usaha kecil dan menengah. Membina dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan pelaku ekonomi khususnya yang bergerak di sektor informal dan usaha ekonomi kerakyatan.
9. Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan sarana alat tangkap bagi nelayan, memanfaatkan potensi kelautan bagi usaha ekonomi lainnya seperti industri dan pariwisata. Pengadaan sarana dan alat pengolahan pertanian bagi petani baik dalam bentuk pemberian bantuan alat dan permodalan (sarpras) maupun melakukan pembinaan secara terus menerus, sehingga petani dan nelayan mampu mandiri dan mengembangkan usahanya mencapai titik optimal bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Mendorong kerjasama dunia usaha dengan kelompok nelayan dan petani serta kelompok usaha kecil lainnya dalam rangka peningkatan mutu dan hasil perikanan dan pertanian serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pertanian.
10. Pembangunan kota-kota yang cepat tumbuh mengacu kepada sistem perkotaan nasional dan regional, yang dimaksudkan untuk mencegah



terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali seperti yang terjadi di Batam serta untuk mengendalikan arus migrasi yang masuk langsung dari luar daerah dengan cara menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta peluang usaha terutama di luar Batam, serta menerapkan kebijakan bagi upaya mencegah semakin turunnya kualitas perkotaan akibat kualitas masyarakat yang mendiaminya semakin rendah.

11. Menerapkan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan peran dan fungsi kota kecil tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal tapi diarahkan menjadi kota mandiri. Menjadikan kota dan kawasan perkotaan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi kegiatan ekonomi dan tempat tinggal, sehingga perlu kawasan penyangga di luar perkotaan untuk usaha yang dapat mengurangi daya dukung lahan perkotaan.
12. Melakukan revitalisasi kawasan perkotaan yang rawan lingkungan terutama kawasan perbukitan dan sekitar sumber air seperti pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda.

6.2.3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata

Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS) secara bersama-sama dan terintegrasi mencerminkan kondisi daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian nasional dan global ditempuh kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, profesional, memiliki etos kerja, trampil dan inovatif. Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berbasis kelautan dengan didukung



peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berahlak mulia.

2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan agar pendayagunaan dan pengawasan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan dapat optimal. Pendekatan antar sektor, integratif dan komprehensif agar konflik dapat dihilangkan akibat egosektoral dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Keterpaduan kebijakan kelautan dengan sektor daratan agar menyatu dalam strategi pembangunan daerah yang kokoh dan pemanfaatan kekuatan darat dan lautan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
3. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta penyadaran masyarakat tentang kelautan yang mampu melestarikan nilai budaya serta wawasan bahari. Mengupayakan melakukan revitalisasi kearifan lokal dan hukum masyarakat asli di bidang kelautan serta melakukan perlindungan peninggalan bawah air dalam bentuk kekayaan daerah dan nasional melalui usaha preservasi, restorasi dan konservasi.
4. Meningkatkan dan memperkuat peranan sumberdaya manusia di bidang kelautan yang dilakukan dengan mendorong jasa pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan khususnya bidang unggulan serta mengembangkan standar kompetensi sumberdaya manusia bidang kelautan. Meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset yang diarahkan bagi pengembangan sistem informasi kelautan yang handal.
5. Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek daerah dalam rangka mendukung iptek nasional. Peningkatan penguasaan dan penerapan iptek secara luas dalam proses produksi barang dan jasa, pengembangan dan penerapan standar mutu dan peningkatan sarana dan prasarana iptek. Pengembangan pemahaman atas hak intelektual dan perlindungan hak cipta.
6. Pengembangan wilayah diarahkan dan diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang serta keunggulan sumberdaya darat dan atau laut di setiap wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pembangunan wilayah dilakukan dengan terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang yang tertuang dalam dokumen rencana yang legal.



7. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, kabupaten/kota dan dunia usaha dalam memberikan peran bagi pengembangan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang tergabung dalam usaha produktif yang akan mendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah.
8. Pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada rencana baik rencana jangka panjang maupun rencana tataruang wilayah (RTRW) yang refresentatif, terintegrasi, terpadu, komprehensif dan maju dalam rangka memberikan arahan pembangunan daerah. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik kelautan dan pertambangan serta sumber daya lainnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor dan wilayah, agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun secara hirarki dan komplementer. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas aparatur perencana dan kelembagaan di bidang penataan ruang, penyusunan RTRW yang berkualitas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah yang menjadi unggulan terutama potensi sumber daya kelautan dan perikanan, industri pengolahan dan pariwisata dalam konteks regional dan global dan membentuk sinergisitas ekonomi dan kebijakan usaha dengan negara tetangga. Meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan untuk mendukung dan didukung oleh sektor strategis lainnya seperti industri, pariwisata, perhubungan dan angkutan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh antara kegiatan hulu dan hilir dalam sistem perkonomian daerah yang tangguh.
11. Pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya perikanan diarahkan untuk menyediakan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan dalam rangka optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah serta menjalin kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan.
12. Pembangunan wisata sehat dan berbudaya yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan sebagai bagian dari kegiatan



menggerakkan ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan wisata bahari yang modern dan terpadu pada setiap kawasan potensial disamping wisata konvensional yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik. Posisi kunjungan wisata Kepulauan Riau yang masuk tertinggi secara nasional tetap dapat dipertahankan. Sejalan dengan itu pengembangan wisata bagi pelayanan wisata domestik dan lokal dengan tetap dilakukan dengan berpihak kepada kebijakan umum pariwisata terutama kegiatan wisata yang mengandalkan wisata alam, budaya dan sejarah.

13. Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan kerjasama pengembangan investasi dengan pemerintah dan pihak luar negeri dan dengan dukungan daerah lainnya termasuk kabupaten/kota.
14. Pembangunan infrastruktur ekonomi diarahkan untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung investasi yang maju, lengkap, modern dan terpadu terutama di daerah yang cepat tumbuh sejalan dengan kegiatan promosi terhadap potensi ekonomi daerah sejalan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.
15. Pemberdayaan dan optimalisasi pulau terluar dengan cara pembinaan dan pengembangan transmigrasi lokal dengan disertai pembangunan sarana dan prasarana dan akses ke pulau terluar baik prasarana perhubungan dan angkutan serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan pulau terluar sebagai potensi strategis baik lokal maupun nasional dengan tujuan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi daerah dan nasional disamping mendukung ketahanan nasional dan benteng bagi ketahanan integrasi nasional dan kedaulatan negara.
16. Pengembangan ekonomi regional diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama dunia usaha dan masyarakat serta menjalin dan meningkatkan kerjasama antar perusahaan dengan pemerintah daerah dan antar kawasan serumpun di segala bidang terutama yang merupakan sektor unggulan daerah.
17. Pengembangan ketahanan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian terhadap potensi kelautan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan di pulau. Peningkatan penelitian kelautan



dan pencegahan dampak perubahan iklim global serta penegakan hukum dan keberpihakan kebijakan yang pro terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Penegakan hukum diutamakan bagi pelanggaran pemanfaatan hasil laut, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan pengrusakan terumbu karang dan meningkatkan konservasi laut.

6.2.4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak arah kebijakan yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan lainnya.

1. Pembangunan investasi dan ekonomi daerah diarahkan kepada penyusunan peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan bagi pelaku usaha dan penegakan hukum untuk kepentingan pengembangan investasi dengan orientasi kepada kepentingan nasional dan daerah. Termasuk menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.
2. Pembangunan wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga dan mendorong ekonomi regional. Sebagai wilayah perbatasan wilayah Kepulauan Riau menjadi pintu gerbang keluar masuk barang ekspor baik dari daerah sendiri maupun daerah lain.
3. Pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan dan kesehatan dan pelayanan medis yang berkualitas dan merata sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dan murah tanpa mengabaikan mutu.
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan khusus bidang pendidikan dan kesehatan seperti bagi kelompok masyarakat rawan sosial dan komunitas terpencil serta pelayanan ibu hamil dan bayi. Termasuk



peningkatan kesadaran pasangan usia subur terhadap kesehatan. Pelayanan prima dengan kualitas sarana dan prasarana yang maju.

5. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat baik listrik, air bersih dan perumahan dengan cara meningkatkan daya mampu pembangkit listrik termasuk peningkatan jaringan dan jangkauan pelayanan serta pencarian tenaga listrik alternatif. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih dengan cara peningkatan sarana dan sumber air termasuk mencari sumber air baru. Membangun perumahan dan meningkatkan kualitas rumah penduduk terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Meningkatkan kualitas perkotaan yang manusiawi dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan.
6. Meningkatkan kesadaran semua pihak baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat akan arti penting pendidikan dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sehingga mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri dan membuka lapangan kerja.
7. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan mulai dari upaya pencegahan agar tidak rusak, meningkatkan kualitas lingkungan yang sudah menurun dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan disegala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diarahkan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di pedesaan dengan tetap menyediakan infrastruktur dasar di pedesaan sekaligus melestarikan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat. Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
9. Mengendalikan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun dengan dukungan jaminan ketersediaan sarana angkutan dan prasarana pendukung bagi lancarnya distribusi barang dan orang serta jaminan stok bagi daerah yang terpencil.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan efisiensi pembangunan.



Mengembangkan lahan pertanian dan wilayah potensial perikanan bagi perekonomian daerah.

6.2.5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata

Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi. Untuk mewujudkan hal itu, arah kebijakan meliputi semua aspek kehidupan dan dirangkum secara umum.

1. Meningkatkan peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan sekaligus sebagai katalisator pembangunan disemua sektor agar pembangunan dan pelayanan publik lebih efisien dan efektif dengan lingkungan yang kondusif.
2. Perlu menjalin hubungan yang lebih luas dengan semua pihak dan tingkatan pemerintahan baik nasional maupun regional. Menjalinkan komunikasi semua pihak berkepentingan untuk mendapatkan dukungan bagi pengembangan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi secara terpadu khususnya wilayah perbatasan, pulau kecil dan pulau terluar. Pengamanan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya oleh pihak asing dan pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
4. Pengembangan potensi ekonomi unggulan diarahkan untuk mengembangkan kekuatan dan potensi kemaritiman dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional, mulai dari membangun jaringan terpadu elemen perdagangan, industri dan perhubungan dan pelayaran (*trade, shipping and industry*), maupun dengan memberdayakan masyarakat nelayan pesisir dan perbatasan.
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan diatas dan bawah laut serta jasa



kelautan. Pembangunan sektor kelautan dengan dukungan industri kelautan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas.

6. Mengembangkan industri perikanan dan kelautan sehingga menjadi andalan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan berbagai upaya yang meliputi pengembangan SDM dibidang kelautan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, penyediaan perangkat peraturan perundangan dan penyediaan fasilitas lainnya. Pengembangan industri perikanan diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan hingga menghasilkan keuntungan yang lestari secara biologis, ekonomis dan ekologis. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya karang, lamun dan mangrove.
7. Secara makro pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan efisiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi dengan cara meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta membangun industri-industri yang berbasis kelautan seperti industri perkapalan, pengolahan hasil ikan, pariwisata bahari dan angkutan/perdagangan. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Mengelola sumber daya alam mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan air tanah, mengusahakan peningkatan dana bagi hasil terutama bagi hasil pajak orang asing dan bagi hasil minyak dan gas (migas) yang signifikan.
8. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan rasa aman di lingkungan masyarakat. Menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan privat).
9. Mengembangkan wilayah perbatasan dan tertinggal dengan keberpihakan agar cepat tumbuh dan berkembang lebih cepat agar dapat mengurangi ketertinggalannya dengan daerah lain. Pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan dan pesisir melalui subsidi dan stimulus dana percepatan pembangunan desa dan kecamatan, maupun dengan jaminan pelayanan publik dan rintisan untuk pelayanan tertentu yang merupakan bentuk



keterkaitan kegiatan ekonomi cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi.

10. Lingkungan hidup memiliki limitasi baik daya dukung maupun daya tampung. Maka dalam jangka panjang pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan dilakukan secara terus menerus dengan cara menjaga keamanan, keselamatan dan lingkungan (*Good Mining Practice*).
11. Meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan sarana dan prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatkan pemerataan dan distribusi pembangunan antar pulau dan antar daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menjadikan bagian wilayah tersebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
12. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara dan meningkatkan pelayanan transportasi (frekuensi dan terjangkau oleh masyarakat) baik dengan cara membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur transportasi darat/laut/udara maupun dengan kegiatan pelibatan masyarakat. Membangun dan meningkatkan jaringan dan tatanan pelayanan perhubungan antar daerah dan antar kawasan.
13. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak atas tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan perundang-undangan, penguasaan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah disertai dengan penerapan insentif dan disentif dalam program *land reform* khususnya perpajakan bidang pertanahan.
14. Mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, mempermudah perizinan dan memperketat pengawasan serta penegakan hukum dan tata kelola perikanan.
15. Kerjasama antar daerah terutama dalam pengembangan potensi unggulan daerah terutama antar daerah yang berdekatan baik dalam pengawasan maupun pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran dalam memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif sehingga inefisiensi dalam pembangunan dapat dihindari.



6.3. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana yang diarahkan dan ingin diwujudkan diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda bagi pembangunan lima tahunan sesuai periode pembangunan jangka menengah. Pentahapan diperlukan untuk mencerminkan urgensi permasalahan dan konsistensi pembangunan namun tidak mengabaikan permasalahan yang muncul pada setiap tahapan pembangunan tersebut. Penekanan pada setiap tahapan berbeda, dan berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya sampai tujuan jangka panjang tercapai.

Sasaran pokok masing-masing misi pembangunan jangka panjang dikemukakan dalam arah pembangunan dan kebijakan yang akan ditempuh ditetapkan prioritas pada masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dipertegas kembali menjadi prioritas utama yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Berdasarkan hal diatas, maka tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang dapat disusun sebagai berikut.

6.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke-1 (2005 – 2010)

Periode ini merupakan periode awal pelaksanaan pembangunan yang juga bersamaan dengan dimulainya pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2004. Berlandaskan pada kondisi awal penyelenggaraan pemerintahan, maka prioritas pembangunan mencakup penataan dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta lembaga pemerintahan agar dapat berfungsi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berjalan dan berfungsinya lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Tersedianya perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta tenaga guru dan paramedis dan pelayanan lainnya yang seimbang.

Kepulauan Riau yang berbudaya ditandai dengan meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, terciptanya masyarakat yang disiplin dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari dan menguatnya kesadaran atas budaya daerah dan etika ketimuran dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan perundang-undangan; menguatnya kelembagaan demokrasi dan meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Berbudaya juga ditandai dengan terlaksananya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta tertatanya kelembagaan birokrasi guna mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Pendidikan dan pembinaan nilai agama dan budaya dalam bentuk peningkatan pemahaman nilai-nilai agama pada semua jenjang pendidikan dan lembaga



kemasyarakatan dan pemerintahan. Pendidikan akhlak dan budaya khususnya Melayu yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang bersifat muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP). Memberdayakan peran dan fungsi lembaga keagamaan dan lembaga adat dan kesenian yang tergambar dalam program kerja secara progresif dan sistematis. Perhatian Pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kesenian tradisional dan aset kebudayaan agar terjaga kelestariannya.

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga agama dan organisasi masyarakat termasuk sanggar seni dan budaya sehingga pembinaan sanggar seni dan budaya mulai terwujud. Perintisan museum sejarah di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga sebagai upaya inventarisasi dan penyelamatan benda-benda bersejarah Kerajaan Melayu Riau-Lingga.

Mengadakan fasilitas kantor yang memadai dan mendukung upaya pelayanan publik untuk akselerasi perekonomian daerah. Membina hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam bidang pemerintahan perlu menyediakan dan menetapkan lokasi dan pusat pemerintahan yang representatif. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan membangun infrastruktur wilayah yang lengkap sejalan dengan penetapan peraturan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Terlaksananya peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya dasar hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.

Dalam bidang aparatur pemerintahan mulai menciptakan sistem *reward and punishment* di lingkungan aparatur dan masyarakat dengan didahului adanya rekrutmen sesuai kebutuhan termasuk adanya upaya mendata arsip-arsip pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bidang pelayanan publik mulai menyediakan dan menyiapkan pelaksanaan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan disertai dengan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur Pemda yang didahului dengan penetapan standar kinerja utama. Mulai berkembangnya kesenian sebagai aset pariwisata budaya sekaligus adanya upaya untuk mendata peninggalan Budaya Melayu yang sudah mulai hilang dan tidak utuh lagi.

Dalam periode ini juga ditekankan perlunya menumbuhkembangkan jiwa keteladanan di masyarakat melalui pelatihan dan pemberian penghargaan kepada tokoh yang berprestasi sebagai salah satu bentuk perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah terhadap pengembangan potensi sumber daya di daerah. Disamping itu untuk kelangsungan pembangunan Kepulauan Riau perlu adanya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung dengan tersedianya fasilitas pendidikan dan olahraga serta pemberian



beasiswa bagi siswa/pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu.

Dalam bidang kemasyarakatan mulainya dilakukan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar intelejen dengan pimpinan daerah terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa

Menciptakan sistem *reward and punishment* di lingkungan aparaturnya dan masyarakat untuk menciptakan kedisiplinan dan rekrutmen tenaga kerja dan aparaturnya pemerintah termasuk guru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pendataan terhadap berbagai peninggalan budaya melayu baik berupa peninggalan sejarah maupun dalam bentuk naskah tulisan yang terdapat di daerah Kepulauan Riau maupun di tempat lain. Hal ini dilakukan guna mencegah agar peninggalan budaya melayu tidak punah dan hilang ditelan masa. Langkah pendataan dilakukan agar dapat menyusun rencana pembangunan dan revitalisasi peninggalan budaya melayu yang hampir mengalami kerusakan dan kepunahan.

Dalam bidang investasi dan perekonomian diupayakan untuk mempermudah proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja termasuk dalam hal ini memberikan kepastian hukum bagi para investor dan memberikan insentif kepada investor di Kepri. Penyusunan dan penetapan peraturan kebijakan investasi yang menarik bagi calon investor terutama dalam upaya mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan membentuk pusat-pusat pengembangan dan badan usaha kawasan investasi yang dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai bagian penting bagi kepastian pengembangan potensi wilayah. Pada periode ini juga mulai terbangunnya infrastruktur pendukung investasi dan terbangunnya pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan perizinan investasi dengan dukungan perda tentang investasi.

Di bidang ekonomi, perhatian utama diarahkan bagi upaya mewujudkan wilayah Kepulauan Riau sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pembangunan infrastruktur, mempermudah birokrasi dalam proses keimigrasian, pabean, perizinan, pajak dan tenaga kerja. Begitu pula di bidang hukum, menyusun peraturan kebijakan investasi yang memberikan daya tarik bagi calon investor dan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan memberikan insentif bagi para investor yang melakukan investasi di Kepulauan Riau. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.



Selain itu diharapkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata berbasis kelautan. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dan kompetitif, mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sentra-sentra UKM yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global dan mewujudkan pariwisata yang mendukung ekonomi daerah serta didukung oleh pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur

Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % dengan migas dan 7,3 % tanpa migas. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru didaerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.

Penanganan penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang menjadi perhatian, dengan mengharapkan partisipasi masyarakat melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan.

Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pelaksana pembangunan yang mendorong perkembangan dan kemajuan di segala bidang. Masyarakat Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan meningkatnya daya saing penduduk dalam kegiatan ekonomi regional, nasional dan global. Kemajuan pembangunan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari waktu ke waktu dan indeks pembangunan gender (IPG) yang ditujukan untuk membangun masyarakat yang berkarakter cerdas dan berakhlak mulia, berkepribadian, tangguh dan kompetitif berdasarkan nilai kebangsaan dan budaya luhur.

Menyusun perencanaan daerah, baik jangka panjang maupun rencana tata ruang yang komprehensif sehingga dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Sejalan dengan persiapan tersebut dilakukan penataan organisasi pemerintahan daerah, menyiapkan sistem, mempersiapkan dan menata aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang industri mulai adanya upaya meningkatnya kualitas dan kuantitas industri kecil untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta mulainya berkembang sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan. Dalam bidang usaha mikro dan kecil mulai dilakukan penataan dan pembinaan UMKM Industri secara konsisten dan berkelanjutan. Mulai dilakukan pendataan potensi sumber daya alam industri sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor industri.



Dalam bidang pertambangan mulai dirancang penyusunan ranperda pengelolaan pertambangan umum dan ranperda air tanah yang disejalkan dengan penyusunan data potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang lebih komprehensif. Untuk jangka waktu yang pendek perlu meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Di bidang pertambangan dimulainya upaya optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan dan air tanah. Dalam bidang SDA migas mulai adanya upaya untuk mewujudkan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas. Adanya evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program *community development* secara efektif.

Oleh karena itu arah kebijakan RPJM 1 dalam bidang sumberdaya mineral dan energi adalah membentuk lembaga pemerintah dalam tingkat provinsi atau tingkat kabupaten sesuai dengan potensinya masing-masing, dilanjutkan dengan penyediaan perangkat pemerintah (sarana prasarana) yang didukung dengan sejumlah pegawai yang memadai (profesional) di bidang sumberdaya mineral dan energi, seperti inventarisasi dan dokumentasi, informasi infrastruktur dan perhubungan, ijin dan kewajiban investasi penambangan dan fabrikasi, peraturan perundangan baik undang-undang, peraturan daerah, keputusan Gubernur, keputusan Bupati, terkait dengan aktifitas dalam bidang sumberdaya mineral dan energi. Pada tahap ini diharapkan lembaga pemerintah yang mengurus bidang sumberdaya energi dan mineral sudah berjalan dan berfungsi dalam pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam sektor sumberdaya energi, pemerintah Provinsi mendesak pemerintah pusat agar di daerahnya termasuk dalam program pembangunan tenaga listrik nasional berkapasitas 10.000 mega watt, agar dapat menggerakkan industri berskala besar, menengah dan kecil. Bersamaan dengan ini dipersiapkan industri kecil dulu yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya mineral seperti kaolin, pasir kwarsa dan granit untuk industri keramik dan bahan bangunan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dan perusahaan atau balai latihan kerja dan industri di pusat maupun di daerah.

Pada periode ini mulai dirancang penyusunan perda pengelolaan sumberdaya mineral dan ranperda air tanah yang disejalkan dengan penyusunan potensi sumberdaya mineral, air tanah dan geologi yang lebih komprehensif. Dalam jangka pendek perlu meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Di bidang ini mulai ada upaya optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha penambangan sumberdaya mineral, industri sumberdaya mineral dan air tanah. Dalam bidang sumberdaya energi migas mulai adanya upaya untuk mewujudkan peningkatan pemasukan dari hasil migas dengan



pemerintah pusat, cq BP Migas dan Departemen Keuangan. Selain itu juga mengadakan evaluasi dan monitoring kegiatan eksplorasi dan produksi migas serta program pengembangan masyarakat secara efektif di sekitar kegiatannya.

Dalam bidang perikanan dan kelautan mulai adanya upaya untuk menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan dan memberikan peningkatan fokus perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan. Pada priode ini diupayakan Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB 3 % yang dilakukan sejalan dengan dimulainya kerjasama perikanan antar daerah dan terjalinnnya kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut.

Dibidang kelautan dan perikanan mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan disejalankan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) dengan dukungan pembangunan dan mulai mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah mulai dilaksanakan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Beberapa bagian wilayah memiliki potensi yang tinggi untuk menghasilkan bahan pangan dan industri dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian-perkebunan. Kawasan pertanian harus dilindungi terhadap invasi kepentingan lain di luar sektor pertanian.

Selanjutnya di sektor pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten/kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi serta mengadakan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus terhadap tenaga pariwisata di kab/kota yang sudah ada. Mulai dilakukan promosi objek wisata kepri ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dan melakukan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri

Di Bidang Infrastruktur, membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan membangun sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi mulai adanya upaya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan merancang sistem dan memperluas e-government serta melakukan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya. Pada periode ini mulai adanya penggunaan/penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terutama bagi kegiatan



yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya dan memperluas jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos sehingga penguasaan dan penggunaan komunikasi dan informasi antar kabupaten-kota terjalin dengan baik.

Perhatian dibidang pendidikan juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru dan medis melalui pendidikan dan latihan yang terprogram dan kontinu sesuai dengan standar.

Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun dengan prioritas pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru.

Dalam bidang pendidikan mulai dibangun fasilitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah bagi semua jenjang pendidikan termasuk pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

Dimulainya penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh jenis dan jenjang sekolah disejalankan dengan adanya usaha untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar nasional. Untuk menjamin mutu pendidikan dimulainya berfungsinya lembaga penjaminan mutu pendidikan di seluruh Kepulauan Riau. Dalam bidang pendidikan dasar mulai dirintis pelaksanaannya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan dukungan pembangunan perpustakaan yang representatif.

Dalam periode ini pendidikan merupakan prioritas utama dan mendapat perhatian antara lain menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh jenis dan jenjang sekolah, meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar nasional dan bersertifikasi, berfungsinya lembaga penjaminan mutu pendidikan di seluruh Kepulauan Riau, terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menciptakan sistem *reward and punishment* di lingkungan aparaturnya dan masyarakat untuk menciptakan kedisiplinan dan rekrutmen tenaga kerja dan aparaturnya pemerintah termasuk guru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja dimulai dari penetapan status BLK untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam bidang ketenagakerjaan, membuat peraturan yang komprehensif yang dapat menjadi dasar dalam sistem rekrutment tenaga kerja. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan serta memprogramkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Untuk pencapaian program pembangunan yang ingin dicapai dalam periode ini, Pemerintah melakukan Pemetaan dan pengembangan potensi unggulan. Selain itu perhatian Pemerintah juga ditujukan pada penempatan tenaga kerja sesuai pada bidangnya masing-masing.



Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur serta tersediannya SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan pada setiap unit kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam bidang ketenagakerjaan, membuat peraturan yang komprehensif yang dapat menjadi dasar dalam sistem rekrutment tenaga kerja. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan serta memprogramkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Untuk pencapaian program pembangunan yang ingin dicapai dalam periode ini, Pemerintah melakukan Pemetaan dan pengembangan potensi unggulan

Penempatan tenaga kerja sesuai pada bidangnya masing-masing dan tersusunnya sistem penggajian yang berbasis kinerja. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan terutama dalam menyongsong berlakunya ekonomi khusus yang disejajarkan dengan melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK menjadi milik provinsi dan memfungsikan BLK yang ada. Tersedianya pegawai teknis ketenagakerjaan (Pengantar Kerja, Mediator, Instruktur, Pengawas Tenaga Kerja) di setiap kabupaten/kota dan mulainya disiapkan perencanaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional. Mulai diupayakan meningkatkan jumlah investor dan ekonomi tumbuh minimal 6% serta tingkat pengangguran 8%. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi mulai ada upaya melakukan pelatihan kewirausahaan terutama di sektor yang strategis.

Di bidang perhubungan terwujudnya peningkatan kapasitas Bandara Kijang (Raja Haji Fisabilillah) di Tanjungpinang, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Sei Bati di Karimun. Pembangunan pelabuhan penyeberangan (roro) di Karimun, Batam dan Bintan serta sejumlah dermaga termasuk perawatan sistem transportasi antar wilayah. Disamping itu mulai dirintis pembangunan Jembatan Batam-Bintan untuk mendukung percepatan aksesibilitas antar pulau.

Dalam bidang angkutan antar pulau mulai dibangun dermaga penyeberangan terutama penyebrangan di Parit Rampak Karimun sambil menyiapkan dermaga penyeberangan di daerah lain sekaligus menyediakan sarana kapal penyebrangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Dalam bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Dalam bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pusat penyebaran sekaligus memfungsikan bandara RHF, Dabo Singkep, Ranai dan Matak secara maksimal. Dalam waktu yang bersamaan perlu menyusun DED *Airstrip* di Letung dan Tambelan dan DED pengembangan Bandara Sei Bati untuk dapat didarati pesawat udara berbadan sedang (*semi wide body*)



Dalam bidang perhubungan mulai dilakukan upaya Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara dan pembangunan pelabuhan penyebrangan (roro) di Karimun serta sejumlah dermaga termasuk perawatan sistem transportasi antar wilayah. Dalam periode ini juga perlu menyediakan dokumen tatanan transportasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didahului dengan kebijakan pemberian subsidi transportasi darat/laut/udara. Dalam bidang transportasi jalan mulai menyediakan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP serta menyediakan angkutan darat yang murah dan efisien terutama bagi pekerja dan anak sekolah.

Dalam bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya mengendalikan penyakit bersumber binatang dan menular langsung serta meningkatkan upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Merintis sistem informasi kesehatan secara bertahap di Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan provinsi secara berjenjang. Dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, setiap kabupaten/kota memiliki RSUD minimal tipe C, provinsi mempunyai RS tipe B non Pendidikan.

Dalam bidang perdagangan mulai upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam periode ini juga diupayakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor. Mulai melakukan pendataan ekportir perikanan dan disejalankan dengan penyusunan data potensi sumber daya alam.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya kesejahteraan dan menurunnya angka pengangguran yang disebabkan tersedianya lapangan pekerjaan dan peluang kerja. Meningkatnya kesejahteraan juga ditandai dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan; meningkatnya kualitas sumberdaya manusia termasuk sumberdaya manusia di bidang kelautan dan maritim yang didukung oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman; semakin membaiknya lingkungan hidup yang dilihat dari berkurangnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan serta penyalahgunaan kawasan untuk kegiatan illegal.

Menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan cara menyusun kebijakan bagi pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok yang berpihak kepada



masyarakat. Dalam bidang sarana prasarana dasar, memberikan perhatian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

Di bidang kesehatan membangun sarana dan prasarana kesehatan dan mulai merancang dan membuat suatu kebijakan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis yang pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya secara bersama antara pemerintah, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya. Menyediakan tenaga guru dan medis yang merata disemua jenjang pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.

Disisi lain pemerintah senantiasa selalu memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kawasan ekonomi khusus serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Mengembangkan kawasan yang memiliki potensi seperti kelautan dan perikanan dan memberikan pembinaan masyarakat nelayan.

Dibidang kelautan dan perikanan dimulai dengan pendataan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, pendataan SDM (nelayan dan shareholder), serta asset lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangannya. Pembinaan dan pengembangan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) yang tangguh dan mandiri dengan dukungan pembangunan dan mulai mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu dengan sarana dan prasarana lain, pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah mulai diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam bidang pengembangan perbatasan mulai dilakukan pendataan potensi pulau-pulau terluar dan perbatasan dan adanya kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. Menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

Dalam bidang pembangunan manusia diupayakan untuk meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kepulauan Riau menjadi 67,9 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 35/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 109/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 12%. Meningkatkan pelayanan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya diperkotaan dan pedesaan dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Meningkatkan upaya penurunan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin baik dalam bentuk pemberian bantuan, subsidi, pembangunan rumah tinggal dan pemberian beasiswa bagi keluarga yang termasuk kurang mampu.



Dalam bidang kelistrikan dimulai penyusunan data dan peta kebutuhan listrik di Provinsi Kepulauan Riau terutama di desa dan pulau kecil, yang disejalankan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik

Di bidang lingkungan hidup, perlu upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik di Provinsi Kepulauan Riau yang didahului dengan menetapkan Standar Mutu Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau sehingga mulai meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup yang memadai. Dalam hal ini perlu upaya meningkatkan peran serta *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengendalian dampak lingkungan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan

6.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke-2 (2011 – 2015)

Berlandaskan hasil dari pelaksanaan, pencapaian dan kondisi serta sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan kepada peningkatan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya alam dengan menyiapkan pemanfaatan ilmu dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global. Periode ini diprioritaskan untuk melanjutkan penataan organisasi pemerintahan daerah, memantapkan sistem, membina dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan agar lebih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semakin efektifnya lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Tersedianya perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta tenaga guru dan paramedis dan pelayanan lainnya yang seimbang. Meningkatnya karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang hukum dan perundang-undangan; meningkatnya etos kerja dan kinerja dalam melaksanakan pembangunan oleh masyarakat dan pemerintah. Semakin meningkatnya pelaksanaan demokrasi yang beretika dan santun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif menuju masyarakat sipil yang madani. Pelayanan publik diberikan dengan lebih baik sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengayom dan pelayan dengan dukungan peningkatan kesejahteraan yang proporsional dan adil. Berkembangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memanfaatkan rencana tata ruang yang sudah dibuat yang ditandai dengan semakin tertatanya pembangunan perkotaan dan pedesaan dengan prinsip saling melengkapi dan mendukung sebagai suatu sistem wilayah pembangunan.



Pendidikan dan pembinaan nilai agama dan budaya terus ditingkatkan baik bentuk dan metodenya pada semua jenjang pendidikan dan lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan. Pendidikan akhlak, budi pekerti dan budaya daerah (Melayu) tidak saja dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang bersifat muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP) tapi juga pendidikan menengah (SMA/SMK). Terus memberdayakan peran dan fungsi lembaga keagamaan dan lembaga adat dan kesenian agar kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kesenian tradisional dan aset kebudayaan tetap terjaga.

Lembaga agama dan organisasi masyarakat termasuk sanggar seni dan budaya terus ditingkatkan pembinaannya, sehingga masyarakat semakin memiliki kesadaran akan akar budayanya. Terus melakukan pendataan terhadap berbagai peninggalan budaya melayu baik berupa peninggalan sejarah maupun dalam bentuk naskah tulisan yang terdapat di daerah Kepulauan Riau maupun di tempat lain. Mencegah agar peninggalan budaya melayu tidak punah dan hilang ditelan masa dan dapat melakukan revitalisasi peninggalan budaya Melayu yang mengalami kerusakan dan kepunahan. Museum sejarah di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga terus dibenahi dan diikuti dengan inventarisasi dan penyelamatan Benda-benda bersejarah lainnya.

Jiwa keteladanan di masyarakat terus ditingkatkan khususnya pemberian penghargaan kepada tokoh dan masyarakat yang berprestasi. Peningkatan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan terus dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun dengan menyediakan fasilitas olahraga serta pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu.

Pelatihan relawan inti penanggulangan bencana dan kesadaran bela negara terus ditingkatkan, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar intelejen dengan pimpinan daerah terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Terus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan membangun infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan mewujudkan peraturan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik dan dasar hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang semakin berkembang.

Terus meningkatkan dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang representatif. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan publik dan akselerasi perekonomian daerah.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan *reward and punishment* di lingkungan aparaturnya sehingga pelayanan publik dapat meningkat dan sudah melaksanakan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan. Kinerja sudah mulai diterapkan dengan disertai penilaian terhadap kinerja seluruh aparaturnya yang didahului dengan penetapan standar kinerja utama.

Dalam bidang investasi dan perekonomian terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menyempurnakan proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja. Kepastian hukum terus ditingkatkan terutama bagi para investor dan terus memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Kepulauan Riau. Melaksanakan peraturan kebijakan investasi yang menarik dalam upaya mewujudkan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai bagian penting bagi kepastian pengembangan potensi wilayah. Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi dan mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan perizinan investasi disertai dengan dukungan perda tentang investasi.

Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menumbuhkembangkan kegiatan industri, perikanan, kelautan dan pariwisata berbasis kelautan. Melanjutkan upaya mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi terus ditingkatkan dengan pelaku UKM yang berkualitas dan sentra-sentra UKMK yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global dan mewujudkan pariwisata yang mendukung ekonomi daerah serta didukung oleh pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur

Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,60% dengan migas dan 7,90 % tanpa migas. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.

Penanganan penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang menjadi perhatian, dengan mengharapkan partisipasi masyarakat melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan.

Pembangunan di Kepulauan Riau terus berkembang dan maju yang ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB baik provinsi maupun kabupaten/kota serta semakin meningkatnya peranan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri dan kelautan yang meliputi



perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral terus berkembang secara sinergis dan berkelanjutan. Daya saing Kepulauan Riau semakin meningkat yang dilihat semakin berperannya tenaga kerja daerah, dunia usaha dan pemerintah daerah pergaulan ekonomi regional, nasional dan internasional. Peningkatan kemajuan pembangunan didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Sumberdaya hayati tidak dieksploitasi dengan sembarangan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Melaksanakan pembangunan dengan berdasarkan perencanaan daerah, baik jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Terus melakukan penataan organisasi pemerintahan daerah, memfungsikan sistem, membina dan mengembangkan kemampuan aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan tugas-tugas perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat mulai berkembang. Pengembangan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan terus ditingkatkan. Dalam bidang usaha mikro dan kecil terus dilakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM Industri kecil secara konsisten dan berkelanjutan. Data potensi Sumber Daya Alam Industri tersedia dengan baik dan dapat diakses dengan mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui semua sektor.

Dalam bidang pertambangan sudah disusun Perda pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah yang disejalankan dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder lainnya dalam pengawasan. Terus dilakukan optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan dan air tanah. Dalam bidang SDA migas terus diupayakan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program *community development* secara efektif dan berkesinambungan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan adalah 6 % (dengan migas) dan 7.5% (tanpa migas).

Dalam sektor sumberdaya energi harus sudah terwujud pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka meningkatkan kapasitas tenaga listrik nasional sebesar 10.000 mega watt, karena mempunyai potensi minyak dan gas bumi. Provinsi Kepulauan



Riau sudah dapat merasakan kapasitas tenaga listrik untuk mendukung pertumbuhan industri menengah dan besar yang menggunakan sumberdaya mineral disamping untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri kecil berbasis sumberdaya mineral seperti pasir kwarsa dan kaolin pada saat RPJM ke 1. Pada periode ini sudah dibangun fabrikasi dan pemanfaatan timah, fabrikasi dan pemanfaatan bauksit yang menggunakan inovasi dan kreatifitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam bidang sumberdaya mineral sudah disusun perda pengelolaan sumberdaya mineral dan perda air tanah yang disejalankan dengan optimalisasi potensi sumberdaya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Selain itu terus meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah termasuk kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Terus melakukan optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan, industri sumberdaya mineral dan air tanah. Dalam bidang sumberdaya energi migas terus diupayakan peningkatan penerimaan dari hasil migas sehingga keuangan daerah terus meningkat. Disamping itu juga melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam bidang perikanan dan kelautan telah dilaksanakan upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil/tradisional dan memberikan peningkatan fokus perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan dan kelautan dengan penyediaan berbagai fasilitas yang dapat dan mudah diakses oleh nelayan kecil/tradisional. Pembangunan berbagai fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan/perizinan sebagai daya tarik bagi investor dibidang perikanan dan kelautan. Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB meningkat 5 % yang dilakukan sejalan dengan dilaksanakannya dengan efektif kerjasama perikanan antar daerah dan terus menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut termasuk perdagangan antar negara dan antar daerah.

Pada tahapan ini dalam bidang pertanian dan perkebunan harus sudah teridentifikasi tingkat potensi fisik lahan dan ketersediaan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai. Sarana dan prasarana fisik yang harus disediakan antara lain jaringan pengairan, ketersediaan sarana produksi pertanian. Berdasarkan analisis produktivitas dan kebutuhan produksi pertanian-perkebunan diterapkan strategi pembangunan sektor pertanian secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian arah pembangunan dan arah kebijakan untuk periode ini dan periode berikutnya lebih konkrit.

Dibidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten/kota dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah



dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kepri ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri

Dibidang infrastruktur, terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar kabupaten/kota terjalin dengan baik.

Perhatian dibidang pendidikan juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru dan medis melalui pendidikan dan latihan yang terprogram dan kontinu sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil menyiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian pendidikan yang terintegrasi. Menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh jenis dan jenjang sekolah terus ditingkatkan, sejalan dengan terus meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar nasional dan bersertifikasi.

Terus menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja dimulai dari penetapan status BLK untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Peraturan yang komprehensif dibidang ketenagakerjaan menjadi dasar dalam sistem rekrutment tenaga kerja. Mengembangkan sistem informasi dan konsultasi ketenagakerjaan serta memprogramkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Terus melakukan *up grade* sarana dan prasarana sejalan dengan terus melakukan pemetaan dan



pengembangan potensi unggulan daerah. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK menjadi milik provinsi dan memfungsikan BLK yang ada. Tersedianya Pegawai Teknis Ketenenagakerjaan (Pengantar Kerja, Mediator, Instruktur, Pengawas Tenaga Kerja) pada setiap Kabupaten/Kota dan mulainya disiapkan perencanaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional. Mulai diupayakan meningkatkan jumlah investor dan ekonomi tumbuh minimal 7 % serta tingkat pengangguran 8%. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi mulai ada upaya melakukan pelatihan kewirausahaan terutama disektor ekonomi kerakyatan.

Di bidang perhubungan peningkatan kualitas dan kapasitas bandara Bandara Kijang (Raja Haji Fisabilillah) di Tanjungpinang, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Sei Bati di Karimun terus dilakukan. Selain itu peningkatan pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) di Karimun, Batam dan Bintan terus ditingkatkan, serta memulai pembangunan Jembatan Batam-Bintan agar mampu mendorong peningkatan ekonomi regional yang lebih cepat. Mempertahankan dan terus meningkatkan status Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pusat penyebaran Regional sekaligus meningkatkan pengembangan dan fungsi bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Bandara Dabo Singkep, Bandara Ranai dan Matak secara maksimal sebagai pusat pelayanan lokal. Dalam waktu yang bersamaan mulai melakukan pembangunan bandara/airstrip di Letung Kepulauan Anambas dan Tambelan Bintan dan pengembangan Bandara Sei Bati Karimun untuk dapat didarati pesawat udara berbadan sedang (*semi wide body*)

Pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) di sebagai bagian dari sistem transportasi antar wilayah. Dalam bidang angkutan antar pulau terus membangun dan memfungsikan dermaga penyeberangan terutama penyeberangan yang sudah terbangun sambil menyiapkan dermaga penyeberangan di daerah lain sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Dalam bidang keselamatan pelayaran tetap menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Dalam periode ini juga perlu menyediakan dokumen tatanan transportasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didahului dengan kebijakan pemberian Subsidi transportasi darat/laut/udara. Dalam bidang transportasi jalan mulai menyediakan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP serta menyediakan angkutan darat yang murah dan efisien terutama bagi pekerja dan anak sekolah.

Dalam bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan pengendalian penyakit bersumber binatang dan menular langsung serta meningkatkan terus meningkatkan upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Menjalankan Sistem informasi



kesehatan secara bertahap di Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang.

Dalam bidang perdagangan terus dilakukan upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, disertai peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor.

Kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau terus meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal. Meningkatnya kesejahteraan sejalan dengan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk yang memberikan peluang lebih baik bagi peningkatan pelayanan dasar masyarakat; menurunnya kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar kawasan dan daerah; semakin meningkatnya hasil pembangunan dari perkembangan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup yang didukung dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi anak dan ibu hamil. Tersedianya jaminan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemanfaatan asuransi kesehatan bagi penduduk.

Terus menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok yang terencana. Dalam bidang sarana prasarana dasar, terus meningkatkan perhatian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah.

Di bidang kesehatan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan mulai melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis yang pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya secara bersama antara pemerintah, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya. Terus menyediakan tenaga guru dan medis yang merata di semua jenjang pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.

Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kawasan ekonomi khusus serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Mengembangkan kawasan



yang memiliki potensi seperti kelautan dan perikanan dan terus melakukan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya.

Di bidang kelautan dan perikanan mulai memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan dan disejalankan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil. Pembangunan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Pengembangan perbatasan mulai dilakukan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. Membangun perekonomian kawasan perbatasan dalam kerangka koneksitas antar wilayah dan pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kepulauan Riau menjadi 70 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 24/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 100/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 10%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan membuat suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya. Menyediakan tenaga guru dan medis yang merata di semua jenjang pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.

Terus meningkatkan pelayanan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan dan perdesaan yang tertinggal dan masuk kategori tertinggal dan *slum* dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam bidang kelistrikan dan energi terus melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan listrik berdasarkan pemetaan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 30 persen rumah tangga terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.



Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya serta didukung dengan semakin meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup. Terus meningkatkan peran serta *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengendalian dampak lingkungan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan.

6.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke-3 (2016 – 2020)

Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi dan sebagai kelanjutan dari RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. Pada periode ini diprioritaskan untuk terus melanjutkan penataan, pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintah dan lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Meningkatkan mutu dan kualitas perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta didukung dengan pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan semakin meningkatnya karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau terus dilakukan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat dengan kaderisasi yang terencana. Hukum dan perundang-undangan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah. Disiplin sudah mulai menjadi bagian budaya daerah yang maju dan menjadi kebanggaan masyarakat untuk menjadi tertib dan berbudaya. Pelayanan publik semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.

Pengamalan nilai agama, hukum dan moral serta budaya terus ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat baik lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Pendidikan akhlak dan budaya sudah mulai masuk ke perguruan tinggi dengan tetap memantapkan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Lembaga keagamaan dan organisasi sosial



kemasyarakatan termasuk lembaga adat dan sanggar seni semakin memiliki peran dalam memantapkan moral dan akhlak masyarakat. Peninggalan budaya dapat dicegah kemusnahannya dengan membuat manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah. Peningkatan peran museum sejarah terus ditingkatkan sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda.

Peningkatan kualitas pemuda terus dilakukan untuk mewujudkan pemuda yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan serta berakhlak dengan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan maupun dengan meningkatkan kualitas sarana pembeinaan dan pengembangan bakat dan keterampilan.

Kesadaran bela negara semakin meningkat, dan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa

Lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif terus dipelihara dan ditingkatkan terutama dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan kebijakan menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik sebagai dasar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

Terus meningkatkan kualitas dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang lebih maju dan modern. Meningkatkan kualitas dan fasilitas kantor pelayanan publik yang lebih maju, efisien dan nyaman.

Reward and punishment menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen pemerintahan yang modern didukung dengan penerapan standar kinerja di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik berdasarkan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan. Penilaian kinerja diterapkan dengan disertai dengan sistem penggajian yang rasional dan proporsional aparatur pemerintah daerah.

Terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.

Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah ada. Terus meningkatkan infrastruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan.



Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dengan tetap menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata berbasis kelautan. Mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi nelayan ditingkatkan sebagai pelaku UKM dan mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global. Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,81 % dengan migas dan 8,02 % tanpa migas. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru didaerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.

Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang terus dikurangi, dengan melibatkan semua pihak baik melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan karena hal ini bertentangan dengan nilai agama dan moral serta merusak citra daerah sebagai Provinsi Kepulauan yang berbudaya.

Pembangunan di Kepulauan Riau maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang mendekati perkapita negara tetangga. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB baik Provinsi Kepulauan Riau maupun kabupaten/kota. Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi. Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral semakin berkembang dan mampu memberikan sinergis dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah. Daya saing Kepulauan Riau semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah. Peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Terus melakukan pembangunan berdasarkan perencanaan yang terarah dan sistematis, dengan memanfaatkan data dan kemajuan teknologi informasi. Pengendalian pembangunan berdasarkan sistem pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan yang terfokus. Pembangunan jangka menengah sudah memperhatikan rencana jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan



dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan.

Perda pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Dalam bidang SDA migas terus diupayakan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat, disejajarkan dengan memberikan peran BUMD dalam mengelola sumberdaya alam di daerah. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program *community development* secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung industri sumberdaya mineral skala menengah dan besar, disamping skala kecil yang sudah terbangun pada periode RPJM Daerah ke-1 dan ke-2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri sumberdaya mineral untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Perda pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dan perda air tanah berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumberdaya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah dengan kerjasama dan koordinasi bersama instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Konservasi sumberdaya mineral (memperpanjang usia penambangan sumberdaya mineral), meningkatkan nilai tambah ekonomi sumberdaya mineral, menambah lapangan kerja, kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional mulai dirasakan. Dalam bidang sumberdaya alam migas terus diupayakan peningkatan sehingga keuangan daerah terus meningkat. Peran BUMD ditingkatkan dalam mengelola sumberdaya mineral di daerah baik penambangan maupun pengolahan menjadi bahan industri berbasis sumberdaya mineral. Terus melakukan evaluasi dan dan monitoring kegiatan eksplorasi dan produksi



migas dan program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

Dalam bidang perikanan dan kelautan terus dilakukan upaya menjaga daerah penangkapan ikan dan peningkatan sektor perikanan terhadap ekonomi daerah. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perikanan, efektifitas peraturan dan efisiensi pelayanan publik, peningkatan eksploitasi sumberdaya perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB meningkat 7 % yang dilaksanakannya dengan efektif dan melalui kajian yang jelas dan meningkatkan kerjasama perikanan antar daerah dan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut termasuk perdagangan antar negara dan antar daerah.

Sebagai implementasi dari pengembangan pertanian berkelanjutan maka perlu disusun konsep pewilayahan komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan menuju produk pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian-perkebunan diikuti dengan pemberdayaan masyarakat pertanian-perkebunan dan lembaga-lembaga pertanian yang sesuai seperti pembinaan petugas lapangan, lembaga keuangan mikro. Di bagian lain upaya diversifikasi komoditas dan diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pertanian-perkebunan perlu ditingkatkan.

Dikbidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten/kota dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kepri ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government. melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya. Penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar kabupaten/kota terjalin dengan baik.



Perhatian di bidang pendidikan tetap dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah terutama daerah yang cepat tumbuh bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

Terus menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana latihan kerja, menyediakan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis IT, dan konsultasi ketenagakerjaan secara online. Peningkatan status BLK menjadi Pusat Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang diakui. Melaksanakan peraturan yang komprehensif dibidang ketenagakerjaan dan mengembangkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Terus melakukan *up grade* sarana dan prasarana sejalan dengan terus melakukan pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK menjadi milik Provinsi dan memfungsikan BLK yang ada. Tersedianya pegawai teknis ketenagakerjaan (Pengantar Kerja, Mediator, Instruktur, Pengawas Tenaga Kerja) pada setiap kabupaten/kota dan mulainya disiapkan perencanaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional. Mulai diupayakan meningkatkan jumlah investor dan ekonomi tumbuh minimal 6,5% serta tingkat pengangguran 7%. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi terus dilakukan pelatihan kewirausahaan terutama disektor yang strategis.

Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara Bandara Kijang (Raja Haji Fisabilillah) di Tanjungpinang, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Sei Bati di Karimun serta peningkatan pembangunan pelabuhan penyebrangan (Ro-Ro) di Karimun, Batam dan Bintan terus dibenahi dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi sarana transportasi yang cepat dan aman. Meningkatkan kualitas layanan Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pusat penyebaran dan pelayanan internasional sekaligus meningkatkan fungsi bandara RHF Tanjungpinang, Dabo Singkep, Ranai dan Matak secara maksimal. Dalam waktu yang bersamaan terus melakukan peningkatan pembangunan Bandara di Letung Kepulauan Riau Anambas dan Tambelan Bintan untuk dapat didarati pesawat udara perintis.

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terus dilakukannya sehingga berfungsi sebagai jalur perhubungan utama antara Batam dan Bintan, sekaligus



menyiapkan pengembangan kawasan Jembatan Batam-Bintan bagi pembangunan pariwisata daerah. Pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) dan angkutan antar pulau terus ditingkatkan. Membangun dan memfungsikan dermaga penyeberangan terutama penyeberangan yang sudah terbangun sambil menyiapkan dermaga penyeberangan di daerah lain sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Dalam bidang keselamatan pelayaran tetap menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Dalam bidang transportasi jalan telah tersedia fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan yang lebih baik dan terminal AKDP berfungsi dalam menata sistem angkutan antar kota dan dalam kota, serta tetap mendorong peningkatan angkutan darat yang murah dan efisien terutama bagi pekerja dan anak sekolah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan baik dengan pengendalian penyakit bersumber binatang dan menular langsung maupun terus meningkatkan upaya pencegahannya yang disejajarkan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang. Dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, setiap kabupaten/kota memiliki RSUD minimal tipe C yang kualitas baik dan Provinsi mempunyai RS tipe B Pendidikan.

Dalam bidang perdagangan terus dilakukan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, dengan tetap disertai oleh peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.

Kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.



Terus menjamin ketahanan pangan dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau baik dengan cara pengadaan, pendistribusian dan pergudangan bahan kebutuhan pokok yang terencana. Sarana prasarana dasar terus ditingkatkan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

Di bidang kesehatan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas yang pelaksanaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terus mengembangkan potensi kelautan dan perikanan dan terus melakukan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. Membangun sarana perekonomian kawasan perbatasan dalam kerangka koneksitas antar wilayah dan pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau dan pengembangan antar sektor.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kepulauan Riau menjadi 71 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 22/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 95/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 8%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama Pemerintah, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota serta pihak lainnya.

Terus meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya diperkotaan *slum* dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan



dan pedesaan yang tertinggal dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.

Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 40 % rumah tangga terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya dan didukung dengan meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup serta terus meningkatkan peran serta *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam Pengendalian dampak Lingkungan.

6.3.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke-4 (2021 – 2025)

Periode ini merupakan periode terakhir dari RPJP Daerah 2005-2025 dan merupakan periode yang terberat. Periode ini menggambarkan apa yang diarahkan dalam arah pembangunan jangka panjang, maka fokus utama pencapaian dalam periode ini adalah mewujudkan tujuan jangka panjang sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi sebagai kelanjutan RPJM ke-3, maka RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing diseluruh wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Periode ini disamping melanjutkan apa yang sudah dibuat pada periode sebelumnya juga menyelesaikan apa yang belum dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tatakelola dan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan efisien dan efektif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dan menganut prinsip manajemen modern. Di dalam menjalankan tugasnya, jumlah pegawai aparatur pemerintahan sudah mulai dibatasi sesuai dengan spesialisasi dan keahlian terutama dengan semakin meningkatnya kemajuan birokrasi dan lembaga yang efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, murah dan efektif

Karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau terus semakin berkembang dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama terus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Hukum dan perundang-undangan terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah secara



konsekuen. Disiplin sudah menjadi bagian budaya daerah yang maju dan telah menjadi kebanggaan masyarakat. Pelayanan publik terus semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.

Terwujudnya pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen sehingga membentuk budaya masyarakat yang madani dan didukung dengan semakin berkurangnya tindak pelanggaran yang merusak moral dan akhlak. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan kehidupan masyarakat telah mencerminkan budaya daerah yang maju.

Kualitas pemuda dan remaja semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya daya saing penduduk dan daerah, prsetasi di bidang olahraga, seni dan ilmu pengetahuan semakin meningkat dengan disertai pelaksanaan *event* di berbagai bidang yang mengembangkan bakat dan kemampuan pemuda dan remaja. Wawasan kebangsaan semakin meningkat dengan terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa yang hakiki dan tingkat perbedaan dan konflik yang semakin minim.

Lingkungan sosial dan lingkungan hidup sudah terjaga dengan kondusif dan berkelanjutan ditingkatkan terutama dengan telah terwujudnya pemerataan pembangunan di segala bidang dan seluruh wilayah. Tata pemerintahan sudah terwujud dengan baik dan berwibawa dengan penerapan manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan dan modern. Sarana di pusat pemerintahan telah terpenuhi menurut standar yang ditetapkan baik kualitas yang lebih modern dan kriteria yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan kinerja dan penilaian sudah mengikuti standar kinerja yang mengutamakan manfaat daripada produk, orientasi penyelenggaraan pemerintahan sudah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

Infrastruktur dasar sudah disediakan menurut standar pelayanan minimal dan optimal, sehingga tingkat pelayanan bagi masyarakat tercapai dengan optimal. Sejalan dengan itu terus melakukan peningkatan kualitas dan peningkatan peran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasana publik.

Kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pemerataan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah terlaksana dengan adil dan proporsional. Pemanfaatan rencana tata ruang sudah mampu memberikan arah bagi pembangunan



spasial yang mencakup kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat sebelumnya bahkan jika perlu ditingkatkan minimal 8,1 % dengan migas dan 8,25 % tanpa migas. Terus melakukan recovery ekonomi dengan peningkatan daya saing dan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang sudah dapat ditekan seminimal mungkin, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas pengamalan nilai agama dan moral baik yang dilakukan oleh lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan.

Pembangunan di Kepulauan Riau maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang mendekati perkapita negara tetangga. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB baik Provinsi Kepulauan Riau maupun Kabupaten/Kota. Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi. Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral semakin berkembang dan mampu memberikan sinergis dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah. Daya saing Kepulauan Riau semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah. Peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip perencanaan yang modern, terbuka dan partisipatif dengan memanfaatkan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan lainnya. Perencanaan sudah disusun dengan memperhitungkan pentingnya data dan informasi sehingga perencanaan dan pembangunan sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Industri berkembang sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan ditopang oleh sektor lain seperti jasa yang terus meningkat kontribusinya sejalan dengan kemajuan pembangunan daerah. Sektor perikanan sudah dikelola dengan prinsip keterpaduan antara sektor laut dan darat yang terintegrasi sehingga saling



mempengaruhi dan melengkapi. Kebijakan sektor darat mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata dan industri kemaritiman.

Pertambangan dikelola dengan tetap memperhatikan kelestariannya, karena pertambangan sebagai sumber daya yang terbatas maka eksploitasi yang berlebihan akan memberikan keterbatasan persediaan bagi generasi yang akan datang. Pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum sektor pertambangan sudah berjalan dengan efektif. Demikian juga pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan prinsip kelestariannya.

Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kemampuannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi industri berbasis sumberdaya mineral dalam skala kecil, menengah dan besar baik dalam kualitas dan kuantitasnya mengingat persaingan global semakin kompetitif.

Pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, konservasi sumberdaya mineral ditingkatkan (umur penambangan sumberdaya mineral diperpanjang). Kelestarian lingkungan dipertahankan dan ditingkatkan, perda pertambangan sumberdaya mineral dan air tanah berjalan sangat efektif. Pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum di sektor pertambangan sumberdaya mineral dan air tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Dalam bidang perikanan dan kelautan terus ditingkatkan terutama tingkat eksploitasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi penduduk akan protein. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan budidaya perairan diselenggarakan dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Perkembangan ekonomi daerah di sektor perikanan mencapai angka yang ideal yaitu 15 persen dari PDRB dan produktivitas nelayan sudah memberikan peningkatan pendapatan yang lebih baik diatas rata-rata nasional.

Pada RPJM tahap IV ini sektor pertanian harus sudah mampu mendukung ketahanan dan kecukupan pangan secara lokal. Untuk mendukung hal tersebut, maka pemantapan pengembangan wilayah berbasis komoditas dan diversifikasi pertanian yang berkelanjutan menjadi titik tolak pembangunan jangka panjang selanjutnya. Hal yang tetap harus mendapat pengendalian yang tegas adalah upaya alih fungsi lahan pertanian ke arah fungsi lain agar tingkat produksi pertanian-perkebunan dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan.

Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah serta pelibatan sektor publik dalam pengelolaan objek dan destinasi wisata. Sejalan dengan itu



peran sektor lain dalam pengembangan pariwisata seperti perhubungan, transportasi dan sektor jasa meningkat.

Pemanfaatan bidang informatika dan telekomunikasi, sudah menjadi bagian penting dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik termasuk penguasaan dan pengembangannya bagi kepentingan nasional dan keamanan daerah. Kemajuan informatika juga dimanfaatkan bagi pendeteksian potensi kekayaan alam dan aspek lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pendidikan 12 tahun sudah berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan pendidikan dasar sejalan dengan peningkatan kualitas dan sebaran pelayanan pendidikan serta manajemen pengelolaan pendidikan yang maju. Kualitas lulusan sekolah di semua tingkatan sudah memiliki daya saing baik untuk memasuki pasar kerja maupun dalam memperoleh peluang meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia tetap dengan mempertimbangkan kemajuan akhlak dan budi pekerti, sehingga sumber daya manusia yang diharapkan tercapai baik kualitas fisik dan mental.

Lembaga latihan kerja sudah berfungsi sebagai pusat pelatihan yang kredibel dan menjadi rujukan bagi penetapan standar kompetensi kerja sesuai dengan jenis dan kebutuhan lapangan kerja. Penataan lembaga dan organisasi balai latihan kerja sehingga profesional dan dapat diandalkan dan tetap menjalin kerjasama dengan dunia usaha terutama bidang yang sesuai. Pengembangan bursa kerja sudah melalui pemanfaatan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan lainnya.

Sarana perhubungan terus dibina dan kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi nyaman, aman, cepat dan mudah serta efisien. Bandara sesuai jenis dan lokasinya terus menjadi ujung tombak bagi pengembangan ekonomi daerah terutama dalam menjamin angkutan orang dan barang. Demikian juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) dan angkutan antar pulau terus ditingkatkan dan sarananya terus ditingkatkan kualitasnya. Jembatan Batam-Bintan menjadi urat nadi pehubungan antar pulau Batam dan Bintan serta mampu mendorong ekonomi masyarakat dari segala bidang terutama pariwisata, perhubungan dan investasi.

Dermaga penyeberangan terutama penyeberangan yang sudah terbangun terus difungsikan dan ditingkatkan sarana dan prasarannya sehingga dapat menjalani rute pelayaran setiap saat tanpa tergantung kepada cuaca. Angkutan kota sudah tertata dengan baik dan modern sehingga perkotaan sebagai pusat perhubungan dan kegiatan ekonomi masyarakat mampu mencitrakan kondisi masyarakatnya yang maju. Angkutan masal yang cepat dan murah terus dikembangkan baik kualitas maupun jangkauannya.



Kesehatan sudah dapat meningkatkan angka harapan hidup mencapai 72 tahun sebagaimana yang direncanakan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas terus dilakukan. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang. Setiap kabupaten/kota sudah memiliki RSUD minimal tipe C yang dikelola dengan baik dan berkualitas baik dan Provinsi mempunyai RS tipe B Pendidikan.

Perdagangan antar pulau dan antar negara terus ditingkatkan terutama dalam rangka pemasaran hasil dan produk dari pengolahan potensi daerah, sehingga neraca perdagangan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan sejalan dengan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha. Pelaksanaan standar dan kualitas produksi dalam negeri dan peningkatan legalitas hasil perdagangan yang mampu bersaing di pasaran global serta pemasaran dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi yang kreatif.

Kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.

Ketahanan pangan terus dijaga, baik dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau maupun dengan meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta potensi lainnya. Distribusi tetap terjaga dengan melibatkan sektor terkait dan kerjasama dengan daerah lain serta dukungan pemerintah dan dunia usaha.

Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan terutama dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat yang rawan sosial dan miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas yang pelaksanaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.



Pembangunan berwawasan lingkungan terus diwujudkan untuk mempersiapkan daya dukung lingkungan pada periode berikutnya, dan untuk itu pengawasan terus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus mengembangkan potensi kelautan dan perikanan dan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan perikanan terus dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejajarkan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta terpadu pemanfaatannya terutama di pulau-pulau terluar dan perbatasan. Terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. Tetap membangun dan membina masyarakat pulau terluar termasuk membangun sarana perekonomian kawasan perbatasan dalam kerangka koneksitas antar wilayah dan pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau dan pengembangan antar sektor.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kepulauan Riau menjadi 72 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 20/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 90/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 6%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial namun dengan cara yang lebih selektif dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Terus mengupayakan peningkatan kualitas rumah dan meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman baik perkotaan dan pedesaan dan melengkapi sarana prasarana perumahan yang lebih baik sehingga tercipta kawasan pemukiman yang manusiawi dan berbudaya. Semakin menurunnya persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi serta semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berubah status ekonomi menjadi penduduk tidak miskin.

Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 50 persen rumah tangga



terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

